



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG
ALIH FUNGSI ST/SKKP MENJADI SMP
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SURAT SERAH TERIMA

Tanah milik Perceel No.1.F.88 Blok.191a dan 197a
di Djalan Tuntang
Demak

Pada hari ini tanggal 12 September 1967 kami berdua yang bertanda tangan dibawah ini :

I. R. SOEFTIMBOEL,

pekerjaan Pimpinan Biro Bangunan CV."VIRGO", bertempat tinggal di Djl. Tegalan no.47 B Djakarta bertindak atas namanya sendiri, selanjutnya disebut fihak Kesatu,

II. R. SLAMET DANOEDIHOYO

sebagai Kepala Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Djawa-Tengah, selanjutnya disebut fihak Kedua, dengan ini menerangkan telah semusakat :

1. fihak kesatu menyerahkan kepada fihak kedua dengan rela dan kesadaran sebidang tanah milik perceel No.1.F.88 blok 191a dan 197a tak terhitung pohon-pohon didalamnya serta bangunan2 yang ada diatas tanah tersebut terletak di djalan Tuntang Demak, untuk dipergunakan chusus membuat Gedung Sekolah Teknik Negeri Demak.
2. Fihak kedua menerima dari fihak kesatu sebidang tanah milik tersebut diatas chusus untuk membuat gedung Sekolah Teknik Demak dan membersihkan pohon-pohonan dll. yang ada diatas tanah tsb. pada waktu memulai pelaksanaan pembangunan, dengan tujutan :
 - a.) fihak kesatu tak akan mengganggu ruang setelah gedung Sekolah Teknik Demak selesai berdiri. Begitu pula dalam waktu dan selama bangunan sedang dikerdjakan.
 - b.) mengingat kepentingan dan sjarah kerja pembangunan-nya fihak kedua perlu mendjaga/mengawasi keamanan tanah selama pekerjaan teknis belum mulai dilaksanakan dan kewajiban penyelesaian administratif pindah alih yang diperlukan dengan jang berwajib.

Demikian surat serah-terima tanah milik ini dibuat dalam 12 (dua belas) ganda untuk dipergunakan dimana perlu.

Jang menerima penyerahan:
Fihak Kedua,

(R. Slamet Danoedihoto)

Sebagai Kepala Kantor Daerah
Dir. Djén. Pnsar Djawa-Tengah

Jang menyerahkan :
Fihak Kesatu,

(R. Soeftimboel)

Pimpinan CV."VIRGO"

SAKSI : Kepala Bap. Noreng Demak. Mengatahi dan menguatkan :

DEMAK

NEGERI

1. Bupati Desa Bintoro



Mengetahui dan menguatkan:
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Demak,
Demak,
Demak,



R.M.D. Bintoro